

KAJIAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI JAWA BARAT

Pritha Aprianoor¹ dan Muhammad Muktiali²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Email: pritha.aprianoor15@pwk.undip.ac.id

Abstrak: *Ketimpangan wilayah dapat terjadi dalam skala nasional maupun lokal. Ketimpangan wilayah menjadi menarik untuk dibahas karena ketimpangan wilayah merupakan salah satu dampak dari awal pembangunan itu sendiri dan apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak buruk bagi wilayah-wilayah yang tertinggal. Penelitian mengenai ketimpangan wilayah ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 26 kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda baik dalam segi ekonomi, demografi serta sumberdaya alam yang berbeda-beda. Pendapatan perkapita yang cukup tinggi tidak terjadi di seluruh wilayah di Jawa Barat. Selain itu, jumlah penduduk tidak merata diseluruh wilayah Jawa Barat, masih ada beberapa wilayah yang mendominasi wilayah lainnya. Angka PDRB yang tinggi hanyadidominasi oleh beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat, sedangkan kota/kabupaten lainnya hanya dapat menghasilkan sedikit pendapatan bahkan tidak sampai 50% dari pendapatan wilayah lainnya seperti Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Pendapatan yang berbeda ini membuat pembangunan dimasing-masing daerah pun menjadi berbeda. Ketimpangan wilayah tidak hanya bisa dilihat dari segi ekonomi, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek lainnya seperti aspek spasial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 16 variabel dengan 66 indikator yang berasal dari aspek sosial, ekonomi serta fisik. Variabel-variabel tersebut menjadi input untuk menilai ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan alat analisis yang digunakan untuk menilai ketimpangan wilayah yaitu, Indeks Williamson dan interregional comparison: standardized variable. Setelah dianalisis menggunakan Indeks Williamson, didapatkan bahwa ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat berada pada level ketimpangan tinggi dengan angka 0,6 pada tahun 2013. Selain itu, kondisi ketimpangan wilayah dilihat berdasarkan 9 kelompok indikator yaitu kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, kelompok jumlah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan dan kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan, kelompok ketenagakerjaan, kelompok produktifitas ekonomi, kelompok performa ekonomi dan investasi, kelompok tataguna lahan dan panjang jalan aspal, kelompok kondisi jalan dan suhu, serta kelompok curah hujan. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kemudian dibentuk tipologi wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi kedalam 7 tipe, yaitu: tipe low-1, tipe low-2, tipe low-3, tipe medium-1, tipe medium-2, tipe high-1 dan tipe high-2. Dari hasil analisis sebelumnya didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat, antara lain: perbedaan kualitas sumberdaya manusia, perbedaan angka pengangguran, perbedaan taraf/ tingkat kesehatan masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan serta kesehatan, perbedaan kualitas infrastruktur, perbedaan jumlah investasi, perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta strategi yang ditujukan langsung terhadap masing-masing wilayah sesuai dengan karakteristik dan masalah yang dialaminya.*

Kata kunci: *Ketimpangan wilayah, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah, Strategi untuk mengurangi ketimpangan wilayah*

Abstract: *Regional disparities can occur in national and local scale. Regional disprities becomes interesting to discuss because it is one of the effectsof early development itself. Research on the regional disparities conducted in West Java Province, that has 26 regencies / cities with different characteristics of economic, demographic and*

natural resources. Per capita income is high enough in some region in West Java but not occur in some other region in West Java. In addition, the population is not evenly distributed throughout the area of West Java, there are still some areas that dominate other regions. High GDP figure is only dominated by a few regencies / cities in West Java, while the other regencies/ city can only generate little revenue is not even up to 50% of revenue other areas such as Jakarta, Bandung, and Bogor Regency. These different revenue makes development in the respective areas becomes different. Regional disparities not only in terms of the economy, but should also consider other aspects such as the spatial aspect. Therefore, this study uses 16 variables with 66 indicators derived from the social, economic and physical. These variables become input to assess regional disparities of West Java Province. The Williamson index and interregional comparison: standardized variables use as analysis tool to assess regional disparity in Wes Java. Having analyzed using Williamson Index, found that inequality region of West Java Province is at the level of high inequality with figures of 0.6 in 2013. In addition, the condition of inequality region viewed by 9 groups of indicators such as welfare groups and education levels of the population, a population group, medical personnel and education and group composition of the population and health facilities, employment group, a group of economic productivity, economic performance and investment groups, groups of land use and the length of paved roads, groups of road conditions and temperature, and groups of rainfall. Based on these conditions then formed typology region of West Java province is divided into 7 types, namely: the type of low-1, the type of low-2, the type of low-3, medium type-1, type of medium-2, the type of high-1 and type high-2. From the analysis of previously obtained several factors that affect regional disparities of West Java Province, among others: differences in the quality of human resources, differences in unemployment rates, the difference in level / degree of public health, differences in educational facilities and health care, differences in the quality of infrastructure, differences in the amount of investment, the difference Local Revenue (PAD), and also strategies aimed directly for each area according to their problem and characteristics.

Keywords: *Regional Disparities, Factors that affect regional disparities, strategies to reduce regional disparities*

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan yang memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada didalamnya. Fungsi dari pengembangan wilayah bila ditinjau dari integrasi nasional menurut Adisasmita (2014) adalah untuk membina dan mengefektifkan keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah yang berspesialisasi secara fungsional dan berorientasi pada pasar secara nasional. Menurut para ahli ekonomi dan perencanaan regional terdapat dua hal terpenting dalam pembangunan, yaitu menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Sirojuzilam, 2005).

Seiring dengan berjalannya waktu ditemui polemik antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan berimbang. Pada awalnya, diduga pemerataan akan tercapai jika ada pertumbuhan, namun kenyataannya tidak. Pertumbuhan suatu wilayah tidak serta merta

dapat menimbulkan pertumbuhan yang sama didaerah lainnya. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan kepada pemerataan, pertumbuhan dan keberlanjutan. Tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang semakin tajam (Adisasmita, 2014).

Regional Income Disparities atau ketimpangan wilayah adalah Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah suatu Negara (Sirojuzilam, 2005). Menurut Adisasmita (2014) daerah-daerah yang mengalami keterbelakangan atau tertinggal mempunyai ketergantungan yang kuat dengan daerah luar.

Provinsi Jawa Barat memiliki 26 kota/kabupaten dengan karakteristik ekonomi, demografi serta sumberdaya alam yang berbeda-beda. Pendapatan perkapita yang cukup tinggi tidak terjadi di seluruh wilayah di Jawa Barat. Selain itu, jumlah penduduk tidak merata diseluruh wilayah Jawa Barat, masih ada beberapa wilayah yang mendominasi wilayah lainnya. Angka PDRB yang tinggi hanya didominasi oleh beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat, sedangkan kota/kabupaten lainnya hanya dapat menghasilkan sedikit pendapatan bahkan tidak sampai 50% dari pendapatan wilayah lainnya seperti Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Pendapatan yang berbeda ini membuat pembangunan dimasing-masing daerah pun menjadi berbeda.

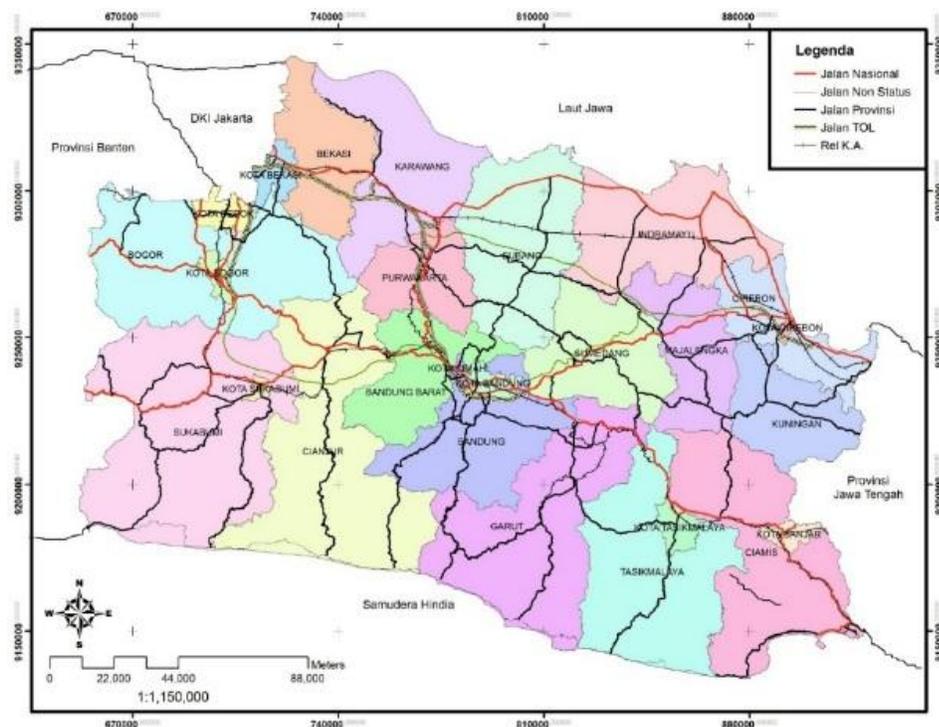
Untuk menyeimbangkan pembangunan tersebut pemerintah pusat melakukan beberapa pembangunan antara lain mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti revitalisasi dan pengembangan kawasan industri di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Subang, Sukabumi hingga di Jawa Barat bagian Selatan. Selain itu, pembangunan sistem logistik yang Efektif dan Efisien, dengan membangun infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan Cilamaya, Bandara Kertajati dan berbagai jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi. Selain pengembangan ekonomi dilakukan juga pengembangan teknologi dan kualitas SDM melalui pengembangan teknologi yang dilakukan pada pusat-pusat pertumbuhan industri yang dilengkapi dengan Pusat Inovasi seperti: Pusat Inovasi Industri Mesin Peralatan (Bekasi), Pusat Inovasi ICT (Bandung-Cimahi), Pusat Inovasi Pertanian (Bogor), Pusat Inovasi Tekstil (Majalengka). (<http://kemenperin.go.id>, 2013). Namun timbul kembali pertanyaan apakah usaha-usaha yang dilakukan telah dapat menghilangkan atau mengurangi ketimpangan yang terjadi di Jawa Barat? dan jika masih terjadi ketimpangan apakah faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan di Jawa Barat dan bagaimana tipologi ketimpangan tersebut? Oleh

karena itu, penelitian ini dibutuhkan sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan merumuskan strategi-strategi untuk mengurangi ketimpangan di Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat, melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah Provinsi Jawa Barat
2. Menganalisis tingkat ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat
3. Menganalisis kondisi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
4. Menganalisis tipologi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat
5. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat
6. Merekomendasikan strategi untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat

Ruang lingkup wilayah yang diambil dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat yang meliputi 26 kota/kabupaten dengan rincian 17 kabupaten dan 9 kota. Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak antara 104° 48' 00" Bujur Timur - 108° 48' 00" Bujur Timur dan 5° 50' 00" Lintang Selatan - 7° 50' 00" Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.709.528,44 Ha dan wilayah pesisir dan laut, sepanjang 12 (dua belas) mil dari garis pantai seluas 18.153 km².



Sumber: Bappeda Jawa Barat, 2015

Gambar 1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat

KAJIAN LITERATUR Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah menurut ILO adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Pendapat lain dikemukakan oleh Karin Vorauer (2007), ketimpangan wilayah adalah ketidakseimbangan struktur spasial didalam wilayah atau antar wilayah. Menurut Sirojuzilam (2005) Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah suatu Negara. Sedangkan menurut Kutscherauer, dkk (2010) ketimpangan wilayah adalah perbedaan atau ketidaksamaan karakteristik, fenomena atau kondisi lokasi dan terjadi minimal diantara dua entitas dari struktur wilayah. Ketimpangan harus dinilai dari beberapa aspek seperti sosial, kondisi lokasi, politik dan administrasi, kelembagaan, lingkungan, infrastruktur umum, dan lain-lain (Gajdos, 2006). Pendekatan

tradisional yang hanya menilai ketimpangan dari segi ekonomi saja dianggap kurang baik dalam menjelaskan ketimpangan tersebut. Menurut Kutscherauer, dkk (2010), ketimpangan wilayah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif vertikal dan horizontal. Perspektif vertikal melihat ketimpangan dari sudut administrative, contohnya ketimpangan di tingkat eropa, ketimpangan di tingkat nasional dan ketimpangan di tingkat lokal. Sedangkan perspektif horizontal melihat ketimpangan dari aspek-aspek yang mempengaruhinya seperti aspek sosial, ekonomi dan fisik.

Strategi Untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi tidak hanya di Indonesia namun juga terjadi di negara-negara lain seperti Republik Ceko dan China. Selain itu di Eropa pun terdapat ketimpangan antar negara-negaranya. Strategi untuk mengatasi ketimpangan wilayah disetiap wilayah berbeda-beda, tergantung kepada

kondisi ketimpangan yang terjadi. Di China, ketimpangan terjadi antara wilayah desa-kota dan wilayah pesisir dengan pedalaman. Oleh karena itu, strategi-strategi yang diterapkan pemerintah harus sesuai dengan kondisi ketimpangan tersebut. Strategi yang diterapkan pemerintah China antara lain (Fan, dkk. 2009):

1. China membangun infrastruktur untuk menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah maju, menghubungkan desa dengan kota dan menghubungkan daerah pedalaman dengan pesisir. Infrastruktur yang dibangun berupa transportasi massal seperti kereta api.
2. Menggunakan investasi untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur
3. Meningkatkan sumberdaya manusia
4. Memperbolehkan penduduk muda untuk bermigrasi keluar
5. Menyediakan pendidikan
6. Menyediakan pelayanan kesehatan

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Yunus (2010) membagi teknik pengumpulan data menjadi 22 teknik yang didalamnya terdapat teknik untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Dari ke-22 teknik tersebut, teknik yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Interpretasi peta, interpretasi tabel, grafik, diagram, akses internet dan mencatat laporan statistik.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan untuk mendapatkan output-output penelitian atau mencapai sasaran penelitian. Output-output tersebut adalah karakteristik wilayah, tingkat ketimpangan wilayah, tipologi ketimpangan wilayah, faktor-faktor penyebab ketimpangan wilayah serta strategi untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Untuk mengetahui karakteristik wilayah maka dilakukan analisis statistik deskriptif, untuk mengetahui ketimpangan wilayah dilakukan analisis indeks Williamson

serta *interregional comparison: standardized variable*, namun sebelum melakukan analisis *interregional comparison: standardized variable* terlebih dahulu dilakukan analisis faktor untuk mendapatkan *integrated indicator* (INI) karena analisis *interregional comparison: standardized variable* membutuhkan *integrated indicator* (INI) sebagai input. Untuk mengetahui tipologi ketimpangan dilakukan analisis kluster dan sebagai inputnya adalah hasil analisis *interregional comparison: standardized variable*. Dari tipologi wilayah bila dilakukan analisis deskriptif maka akan didapatkan faktor-faktor penyebab ketimpangan wilayah. Dari output-output tersebut diatas jika dilakukan analisis deskriptif maka didapatkan strategi untuk mengurangi ketimpangan di Jawa Barat.

HASIL PEMBAHASAN

Tingkat Ketimpangan Wilayah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis indeks Williamson, ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat termasuk ketimpangan level tinggi. Indeks ketimpangan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 mencapai 0.61, menurut Matolla dalam Puspandika (2007) nilai IW diatas 0.5 berarti wilayah tersebut memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi. Tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan pada indeks ketimpangan Jawa Barat antara tahun 2007 – 2013.

Tabel 1 Tingkat Ketimpangan Provinsi Jawa Barat

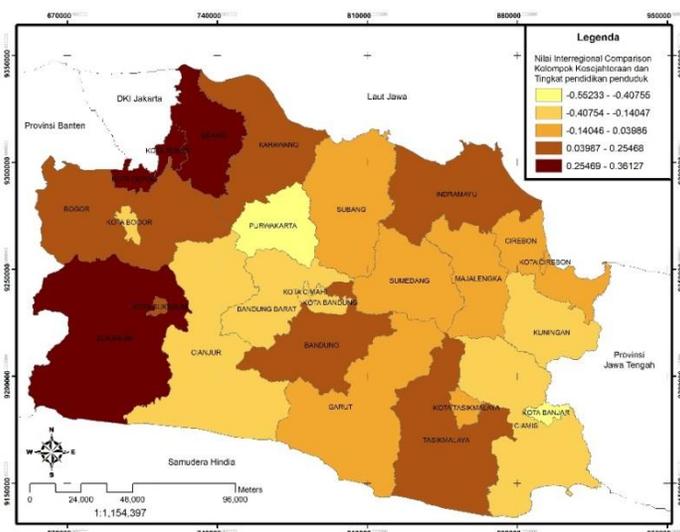
Tahun	Nilai Indeks Williamson (IW)	Keterangan
2007	0.68	Ketimpangan level tinggi
2008	0.68	Ketimpangan level tinggi
2009	0.69	Ketimpangan level tinggi
2010	0.62	Ketimpangan level tinggi
2011	0.62	Ketimpangan level tinggi
2012	0.61	Ketimpangan level tinggi
2013	0.61	Ketimpangan level tinggi

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2015

Tingkat ketimpangan yang tinggi terjadi karena kegiatan perekonomian maupun pembangunan hanya berpusat di beberapa wilayah saja, seperti Kota Bandung sebagai ibukota dan beberapa wilayah lain yang dijadikan sebagai pusat industri seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi serta Karawang yang berada di wilayah utara Jawa Barat, dengan luas wilayah yang cukup besar, perkembangan di salah satu wilayah ini tidak dapat mempengaruhi semua wilayah, akibatnya beberapa wilayah maju pesat sedangkan yang lainnya tidak. Sejak tahun 2010, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengadakan pembangunan-pembangunan lainnya, seperti revitalisasi dan pengembangan kawasan industri di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Subang, Sukabumi hingga di Jawa Barat bagian Selatan. Selain itu, pembangunan sistem logistik yang Efektif dan Efisien, dengan membangun infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan Cilamaya, Bandara Kertajati dan berbagai jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi. Hal ini sepertinya mulai dapat menurunkan ketimpangan di Jawa Barat meskipun tidak terlalu signifikan.

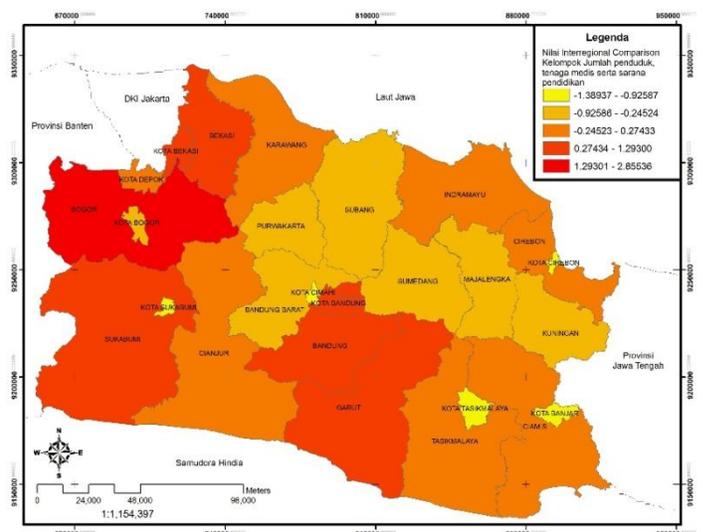
Kondisi Ketimpangan Antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

Kondisi ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dilihat dari 9 kelompok, yaitu: kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, kelompok jumlah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan dan kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan. Kondisi ketimpangan pada setiap kelompok berbeda-beda, wilayah yang memiliki nilai rendah pada satu kelompok belum tentu memiliki nilai yang rendah pula pada kelompok lainnya. Pada kelompok jumlah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan, terdapat 11 wilayah yang tergolong memiliki nilai yang rendah pada aspek tersebut, sedikit lebih banyak dibandingkan pada kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk, sedangkan pada kelompok komposisi penduduk dan sarana kesehatan hanya terdapat 6 wilayah yang tergolong memiliki nilai rendah. Hal ini membuktikan bahwa suatu daerah memiliki beragam karakteristik, dan apabila daerah tersebut tergolong kurang berkembang, bukan berarti wilayah tersebut tidak memiliki kekuatan untuk berkembang.



Sumber: Hasil analisis, 2015

Gambar 2 Peta Kondisi Ketimpangan berdasarkan Kelompok kesejahteraan dan tingkat pendidikan penduduk



Sumber: Hasil analisis, 2015

Gambar 3 Peta Kondisi Ketimpangan berdasarkan Kelompok jumlah penduduk, tenaga medis serta sarana pendidikan

Tipologi Ketimpangan Wilayah Provinsi Jawa Barat

Tipologi ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat dibagi kedalam 7 tipe, pengelompokan wilayah ini menggunakan analisis klaster dan didasarkan pada nilai yang didapatkan setiap wilayah pada setiap kelompok indikator. Setiap tipe ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

1. Tipe Low-1

Wilayah yang termasuk tipe low-1 adalah Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis dan Kota Banjar. Tipe ini memiliki karakteristik bernilai rendah hampir diseluruh sektor. Nilai rendah pada kelompok sosial 1 dan sosial 2, yang berarti memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat rendah serta angka kemiskinan yang tinggi. Namun memiliki nilai tinggi pada kelompok sosial 3, yang berarti memiliki penduduk usia produktif yang tinggi, yang dapat menjadi potensi bagi kemajuan wilayah didalam tipe ini.

Tipe Low-1 memiliki nilai yang sangat rendah dalam seluruh kelompok ekonomi, yang berarti memiliki angka pengangguran yang tinggi, kemampuan dan produktifitas pekerja yang rendah, PDRB serta investasi yang rendah pula. Performa perekonomian di wilayah-wilayah ini tentu harus sangat ditingkatkan. Selain perekonomian, tipe ini juga memiliki nilai yang rendah pada kelompok fisik, yang berarti memiliki nilai rendah ada infrastruktur serta masih didominasi oleh lahan pertanian dan perhutanan yang belum dapat dioptimalkan.

2. Tipe Low-2

Wilayah yang termasuk tipe low-2 adalah Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, dan Kota Cirebon. Hampir sama dengan tipe low-1, memiliki karakteristik bernilai rendah hampir diseluruh sektor. Perbedaannya terletak pada kondisi perekonomian, tipe ini memiliki kemampuan pekerja dan angka pengangguran yang tidak terlalu buruk dan kualitas jalan yang tidak terlalu buruk.

3. Tipe Low-3

Wilayah yang termasuk tipe low-3 adalah Kota Depok, Bandung Barat, Cianjur, Garut, dan Bandung. Tipe ini memiliki karakteristik sedikit lebih baik diantara tipe low-1 dan tipe low-2, cukup baik pada sektor sosial. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah tipe ini cukup baik, selain itu juga angka kemiskinan tidak terlalu tinggi. Namun wilayah ini kurang memiliki sarana kesehatan yang memadai serta jumlah penduduk produktif tidak terlalu banyak, hal ini tidak terlalu menjadi masalah selama produktifitas penduduk usia produktif tersebut tinggi. Tipe ini juga memiliki angka pengangguran yang tidak terlalu buruk serta kemampuan pekerja yang tidak terlalu buruk juga. Namun PDRB di wilayah ini masih rendah, berarti masih terdapat ketidakefektifan diwilayah ini. Selain itu, nilai investasi pada wilayah tipe ini juga masih rendah. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan masih buruk, persentase jalan baik masih cukup sedikit, hal ini bisa menghambat mobilitas.

4. Tipe Medium-1

Wilayah yang termasuk tipe medium-1 adalah Indramayu dan Cirebon. Tipe ini tentu saja memiliki nilai yang lebih baik diantara tiga tipe sebelumnya. Tipe ini memiliki karakteristik cukup baik hamper di semua sektor, yang berarti nilai setiap sektor berada diantara baik dan rendah. Tipe ini masih harus meningkatkan performanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada kelompok sosial tipe ini memiliki nilai yang cukup baik, bahkan memiliki nilai yang baik pada tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Selain itu, perekonomian di wilayah ini juga baik, hanya saja masih terdapat sedikit kekurangan pada progresifitas PDRB serta nilai upah minimum masyarakat masih rendah serta angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Selain itu, kemampuan pekerja di tipe ini juga belum cukup baik. Sedangkan untuk infrastruktur yaitu jalan, tipe ini sudah memiliki kondisi yang baik.

5. Tipe Medium-2

Wilayah yang termasuk kedalam tipe medium-2 adalah Kota Bandung. Karakteristik

tipe ini hampir sama dengan tipe medium-1. Perbedaannya terletak pada kondisi perekonomian tipe ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian tipe medium-1. Meskipun demikian, kondisi perekonomin yang sudah baik, semestinya bisa ditingkatkan lagi, begitupun dengan sektor sosial dan fisik lainnya. Tipe ini hanya memiliki sedikit kekurangan yaitu pada fasilitas kesehatan tingkat desa/kelurahan. Selain itu persentase jalan baik masih harus ditingkatkan.

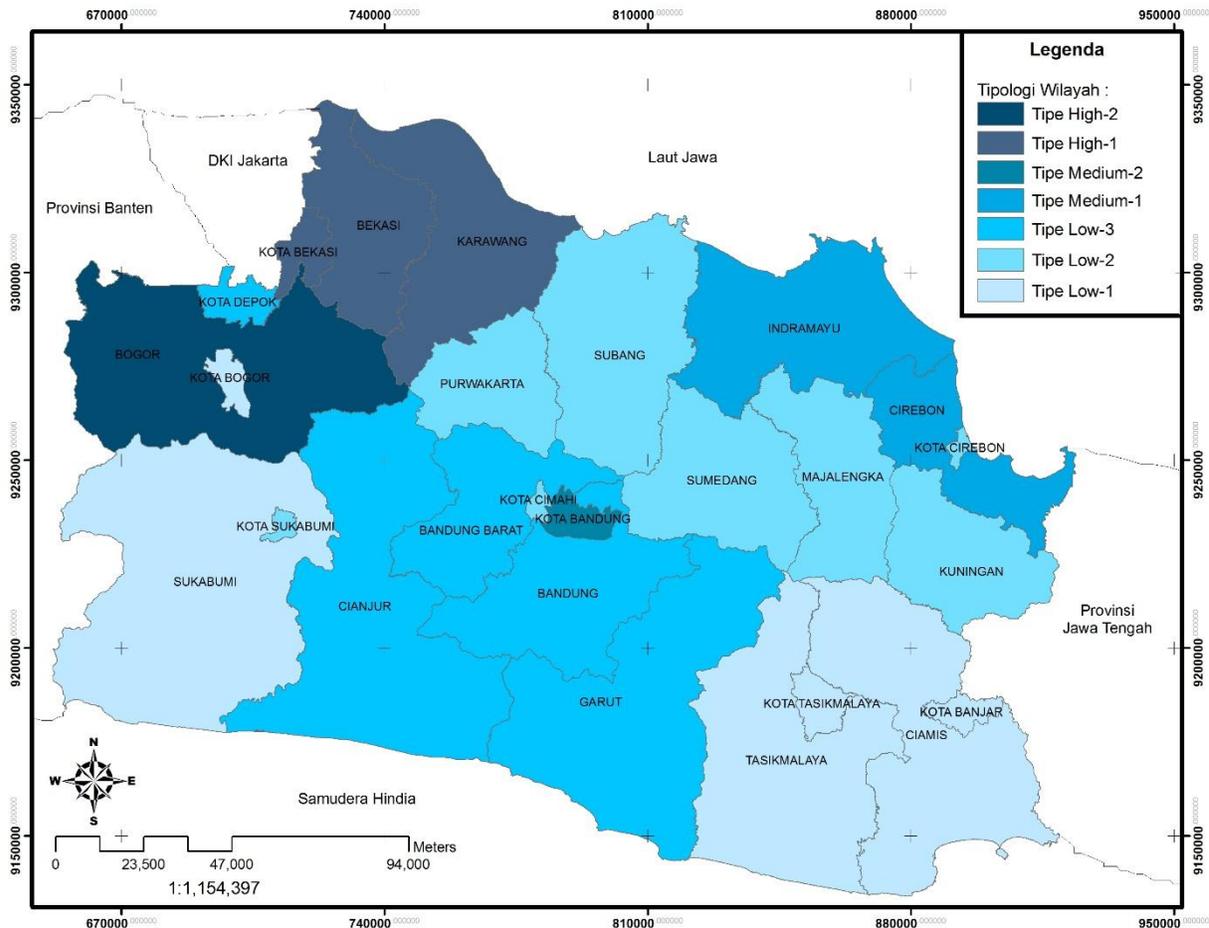
6. Tipe High-1

Tipe high-1 memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya, namun masih belum optimal beberapa sektor mendapatkan nilai yang tinggi

dan sangat tinggi atau dapat dikatakan sangat baik, namun beberapa sektor lain hanya mendapatkan nilai cukup baik atau berada diantara rendah dan baik, berbeda dengan tipe high-2 yang memiliki nilai yang sangat tinggi di seluruh sektor. Wilayah yang termasuk tipe ini adalah Kota Bekasi, Bekasi dan Karawang.

7. Tipe High-2

Wilayah yang termasuk kedalam tipe high-2 ini adalah Kabupaten Bogor. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tipe high-2 ini memiliki nilai yang sangat baik disemua sektor, dan tentu tipe ini memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan seluruh tipe sebelumnya.



Sumber: Hasil analisis, 2015

Gambar 4 Peta Tipologi Wilayah Provinsi Jawa Barat

Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan gambaran kondisi ketimpangan wilayah di Jawa Barat serta tipologi ketimpangan wilayah di Jawa Barat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Jawa Barat. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Perbedaan kualitas sumberdaya manusia
Sumberdaya manusia sangat penting bagi suatu wilayah. Namun tanpa kualitas yang memadai sumberdaya manusia ini kurang dapat berperan optimal dalam kemajuan wilayah. Perbedaan kualitas sumberdaya manusia yang dimaksud adalah tingkat pendidikan masyarakat, serta tingkat pendidikan pekerja. Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dan nilai jual masyarakat itu sendiri. Pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan kemampuan rendah akan sulit mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang baik. Dibeberapa wilayah seperti Sukabumi, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Purwakarta, Subang, Majalengka, Kuningan serta beberapa daerah lainnya, penduduk yang tingkat pendidikan terakhirnya SMA atau lebih sangat sedikit, sebagian besar penduduk hanya berbekal pendidikan tingkat SMP atau SD. Oleh karena itu, produktifitas pekerja di wilayah ini tergolong rendah dan penduduk belum bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk lainnya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut.
2. Perbedaan angka pengangguran
Angka pengangguran atau penduduk usia produktif yang tidak bekerja dan tidak sedang melanjutkan pendidikannya tentu menjadi beban bagi pemerintah. Perbedaan kemampuan penyerapan tenaga kerja suatu wilayah dapat menjadi

salah satu penyebab tingginya angka pengangguran, selain itu rendahnya kemampuan masyarakat juga membuat masyarakat tersebut kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

3. Perbedaan taraf/ tingkat kesehatan masyarakat
Kesehatan merupakan salah satu inventasi, dengan kesehatan yang baik, produktifitas kerja dapat meningkat. Masyarakat dapat melakukan usaha-usaha untuk menyejahterakan kehidupannya. Perbedaan taraf/ tingkat kesehatan yang dimaksud adalah angka harapan hidup serta angka kematian bayi. Beberapa wilayah di Jawa Barat memiliki angka kematian bayi yang sangat tinggi seperti Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, dan Majalengka. Hal ini mengindikasikan kesehatan masyarakat masih belum bisa dikatakan baik, selain itu laju pertumbuhan penduduk menjadi rendah dan dapat menghambat regenerasi penduduk.
4. Perbedaan fasilitas pendidikan serta kesehatan
Banyaknya fasilitas pendidikan dan kesehatan akan mempermudah masyarakat untuk mengakses atau menjangkau pendidikan yang lebih baik serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pula, sehingga tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat meningkat.
5. Perbedaan kualitas infrastruktur
Kualitas infrastruktur yang dimaksud adalah jalan sebagai prasarana transportasi. Jalan sangat penting bagi mobilitas barang dan jasa, migrasi maupun lainnya. Terhambatnya mobilitas akan berdampak pada terhambatnya hubungan antar wilayah. Seperti yang dikatakan Sjafrizal (2008) terhambatnya mobilitas dapat mengakibatkan kelebihan produksi sulit untuk dikirim ke daerah lain yang membutuhkan begitupun sebaliknya

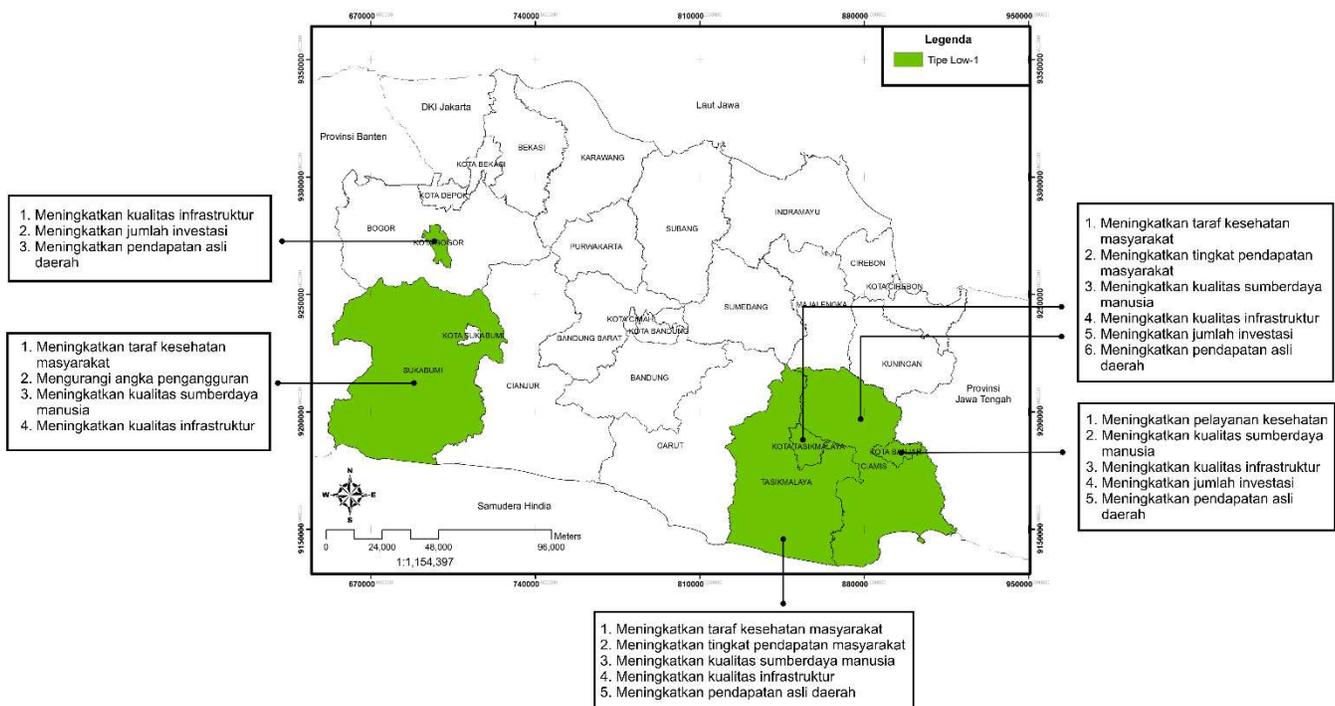
dan hal ini juga berlaku untuk tenaga kerja. Kualitas infrastruktur juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor, jika infrastruktur buruk maka investor akan enggan untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

6. Perbedaan jumlah investasi
Investasi baik berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri dapat berdampak pada kemampuan suatu wilayah untuk melakukan pembangunan. Investasi ini sangat diperlukan oleh wilayah untuk memperbaiki keadaan wilayahnya seperti memperbaiki infrastruktur, meningkatkan fasilitas publik dan lainnya. Investasi juga dapat menjadi penggerak bagi perekonomian wilayah, oleh karena itu perbedaan jumlah investasi ini juga dapat menyebabkan perbedaan performa ekonomi wilayah.
7. Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perbedaan pendapatan asli daerah tentu sangat mempengaruhi performa

perekonomian suatu wilayah. Pendapatan daerah dapat membiayai pembangunan-pembangunan yang dilakukan wilayah tersebut.

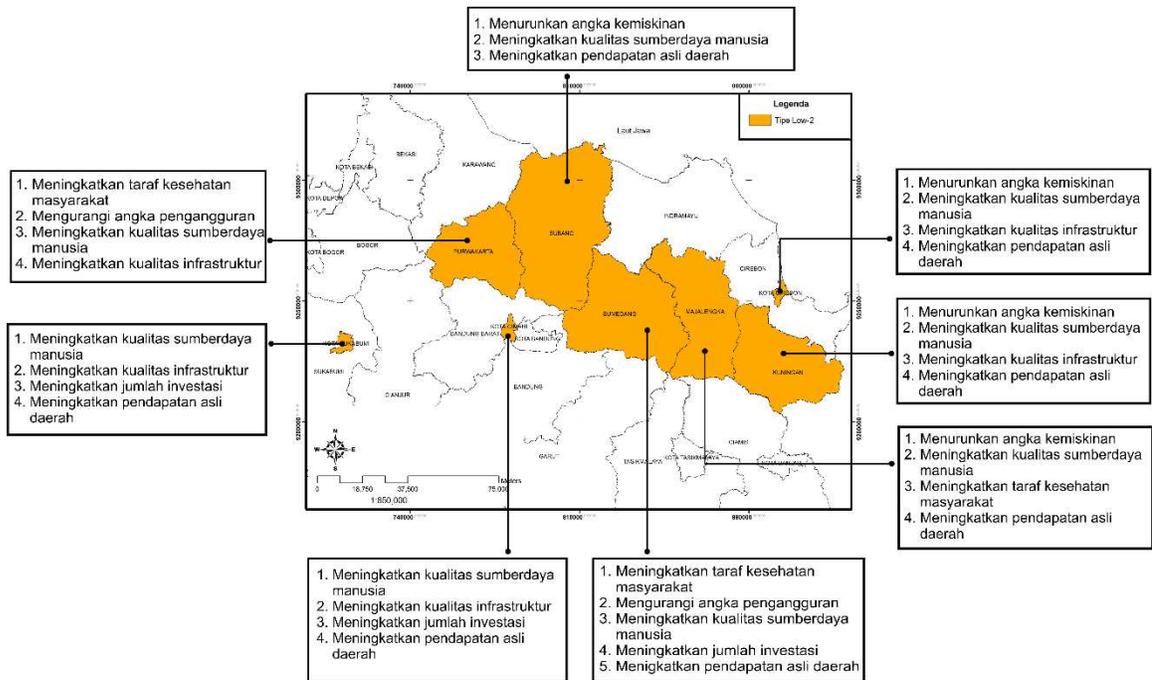
Strategi untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat

Ketimpangan wilayah tentu harus segera diatasi sebelum kondisinya bertambah parah. Setiap wilayah di Jawa Barat memiliki kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, strategi yang digunakan akan lebih efektif jika sesuai berdasarkan kondisi masing-masing dan tidak di generalisir. Strategi-strategi yang dirumuskan dikelompokan sesuai dengan tipologi ketimpangannya, namun setiap wilayah tetap memiliki strategi tersendiri. Terdapat dua tipe yang tidak masuk diberikan rekomendasi strategi karena dinilai sudah baik pada semua sektor hanya perlu menjaga kestabilannya saja, tipe tersebut adalah tipe high-1 dan tipe high-2. Berikut strategi untuk lima tipe lainnya:

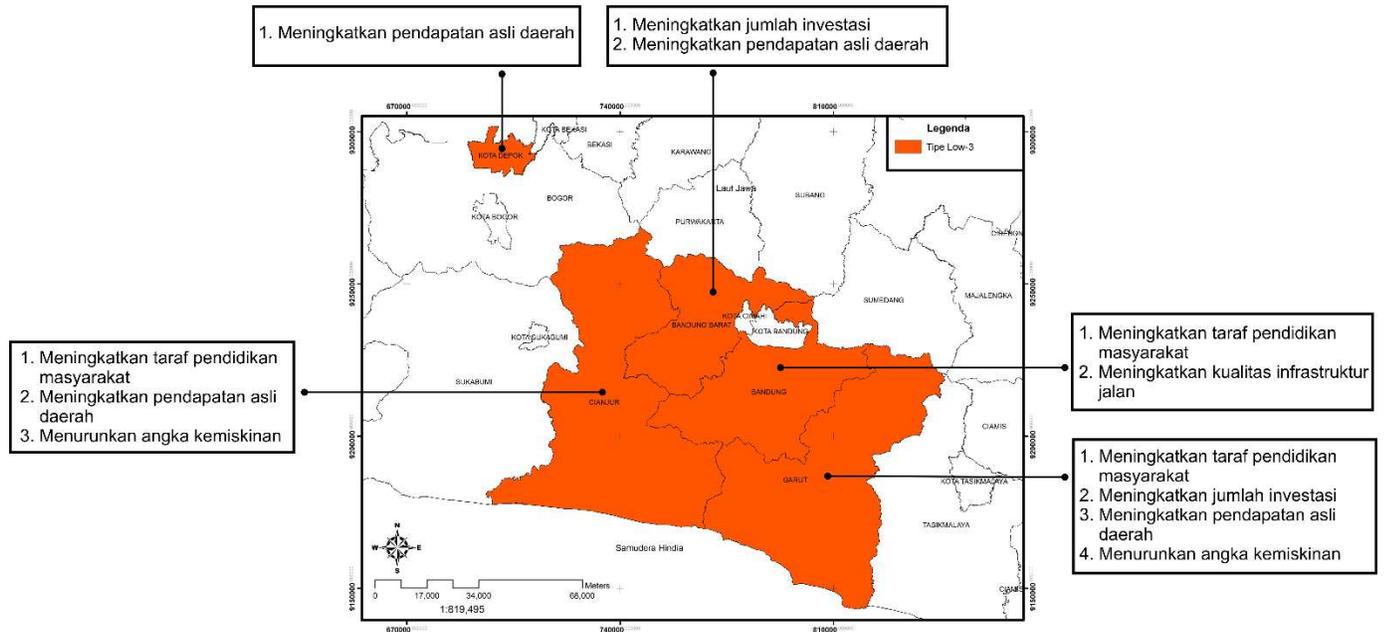


Sumber: Hasil analisis, 2015

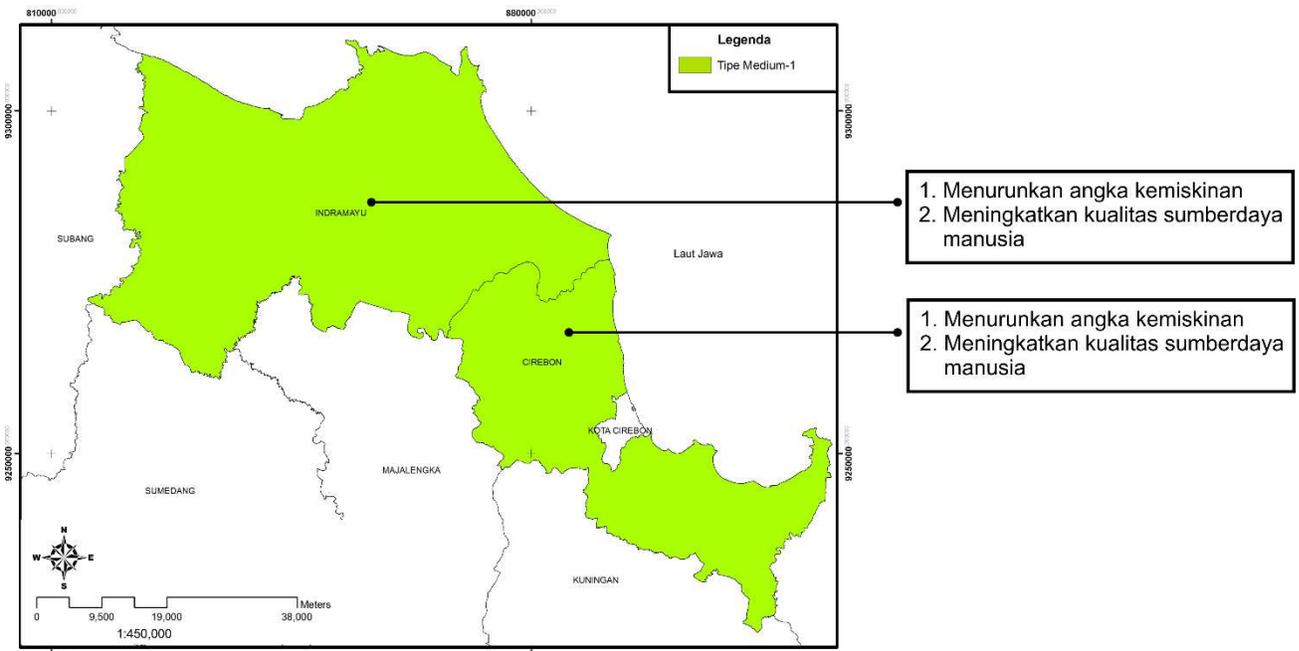
Gambar 5 Peta Strategi Tipe Low-1



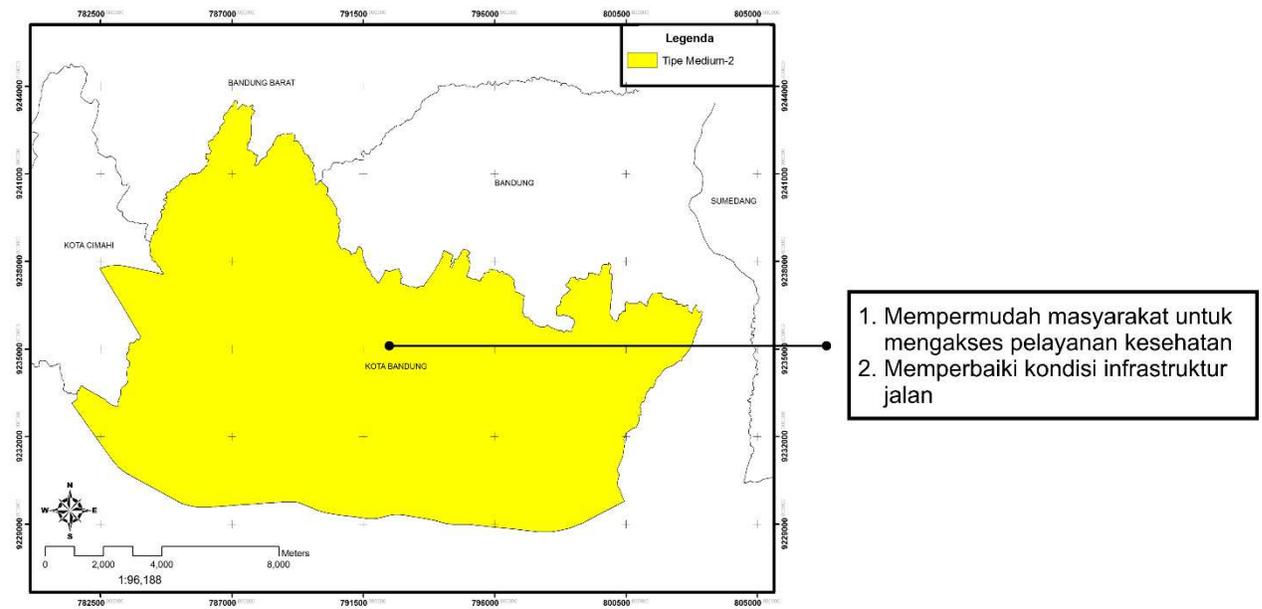
Sumber: Hasil analisis, 2015 **Gambar 6** Peta Strategi Tipe Low-2



Sumber: Hasil analisis, 2015 **Gambar 7** Peta Strategi Tipe Low-3



Sumber: Hasil analisis, 2015 **Gambar 8** Peta Strategi Tipe Medium-1



Sumber: Hasil analisis, 2015 **Gambar 9** Peta Strategi Tipe Medium-2

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat, diperoleh temuan studi sebagai berikut:

1. Tingkat ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis menggunakan indeks Williamson tingkat ketimpangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 adalah 0,61 dan termasuk kedalam kategori wilayah yang memiliki ketimpangan tinggi. Selama tahun 2007 sampai 2013 indeks ketimpangan di Provinsi Jawa Barat tidak terlalu fluktuatif selalu berada pada angka 0.6.

2. Kondisi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

Kondisi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dianalisis menggunakan *interregional comparison: standardized variable* dengan beberapa aspek seperti sosial, ekonomi dan fisik. Ketiga aspek tersebut kemudian dijadikan 9 kelompok agar dapat terlihat lebih jelas kondisi ketimpangan antar wilayah. Setiap kelompok menunjukkan kondisi ketimpangan yang berbeda-beda, wilayah yang memiliki nilai buruk pada satu kelompok belum tentu mendapatkan nilai buruk di kelompok-kelompok lainnya, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu sangat penting untuk menilai ketimpangan antar wilayah ini dari beberapa aspek, sehingga dapat diketahui kelemahan dan keunggulan wilayah tersebut.

3. Tipologi ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat

Tipologi ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Barat dibagi kedalam 7 tipe, yaitu: tipe low-1, tipe low-2, tipe low-3, tipe medium-1, tipe medium-2, tipe high-1 dan tipe high-2 yang secara berurutan karakteristiknya semakin baik. Semua tipe low memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu buruk di semua sektor, sedangkan tipe medium memiliki karakteristik yang sedang-sedang saja pada hampir semua sektor dan masih bisa ditingkatkan, dan tipe

high memiliki karakteristik sangat baik di semua sektor. Berdasarkan tipologi ini dapat diketahui bahwa 19 wilayah atau 73% kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat termasuk tipe low atau rendah.

4. Faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat

Terdapat beberapa faktor yang dinyatakan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat, faktor tersebut yaitu: Perbedaan kualitas sumberdaya manusia, Perbedaan angka pengangguran, Perbedaan taraf/ tingkat kesehatan masyarakat, Perbedaan fasilitas pendidikan serta kesehatan, Perbedaan kualitas infrastruktur, Perbedaan jumlah investasi, Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Strategi untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat

Strategi untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat dibagi berdasarkan tipe wilayah, meskipun demikian setiap kabupaten/kota tetap memiliki strategi masing-masing sesuai dengan kondisi wilayahnya. Strategi yang dapat dirumuskan antara lain: meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan jumlah investasi, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan lain-lain.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan hasil studi dan kesimpulan di atas, selain strategi dapat pula diusulkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah:

- Pemerintah harus bisa mengenali potensi dan kelemahan wilayah masing-masing. Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri yang apabila dikenali dan secara kreatif dikembangkan, akan menjadi nilai tambah bagi wilayah tersebut. Contohnya seperti wilayah yang memiliki sektor basis pertanian, apabila pemerintah tidak mengenali potensi ini maka pertanian akan dibiarkan menjadi pertanian

konvensional, namun apabila pemerintah cermat dalam mengenali potensi wilayah, pertanian ini dapat dijadikan agroindustri maupun agrowisata yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan lebih.

- Pemerintah mencari peluang untuk mengembangkan potensi wilayah dan bisa bersaing dengan wilayah lainnya. Terkadang potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah juga dimiliki oleh wilayah lain sehingga timbul persaingan. Oleh karena itu, pemerintah harus pintar dalam mencari peluang, salah satu contohnya adalah kelebihan produksi pertanian, hal ini menjadi suatu potensi karena dengan mengeksplor, wilayah bisa mendapatkan pendapatan lebih baik, namun persaingan dalam mengeksplor pun tidak sedikit, maka pemerintah harus mencari cara agar dapat bersaing seperti meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pelayanan, meningkatkan kecepatan pengiriman barang, dan lain-lain.
- Menjalinkan kerjasama antar wilayah agar dapat saling melengkapi. Kerjasama antar wilayah tentu sangat dibutuhkan, kerjasama yang dapat terjadi seperti ekspor impor, pertukaran pelajar dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2005). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Angelia, Y. (2010). "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 1995-2008". Skripsi S-1 Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Caska dan R.M Riadi. (2007). "Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau". <http://rmriadi.yolasite.com>. Diunduh Rabu, 25 Februari 2015.
- Esquivel, G. (2010). "The Dynamic of Income Inequality In Mexico Since NAFTA". dalam jurnal *Centro de Estudios Economicos No.IX-2010*. El Colegio de Mexico.
- Ezcurra, Roberto dan Andres Rodriguez-pose. 2013. "Does Economic Globalization affect Regional Inequality? A Cross-country Analysis". dalam jurnal *World Development*. Vol. 52. hlm. 92-103.
- Fan, Shenggen, dkk. 2009. "China's Regional Disparities: Experience and Policy" dalam *China Economic Research and Advisory*.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: LPEE-UI.
- Hartono, B. (2008). "Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi jawa tengah". Tesis S-2 Prodi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
- Iniguez-Montel, Alberto Javier. (2014). "Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty, Inequality, and Economic Growth (1992-2008)". Dalam jurnal *World Development*. Vol. 59. hlm. 313-326.
- Keadaan Data Angkatan Kerja Daerah Jawa Barat. 2013. Kota Bandung. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Kutscherauer, Alois, dkk. 2010. *Regional Disparities In Regional Development of the Czech Republic*. Ostrava: Universitas Teknik Ostrava.
- Masli, Lili. (2008). "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat". <http://www.stan-im.ac.id>. Diunduh Senin, 12 Januari 2015.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Nilai investasi menurut kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat. 2013. Kota Bandung. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat.

- Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Perlu Dipercepat. 2013. Dalam <http://kemenperin.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2015.
- Potensi Sumberdaya Alam. 2007. Dalam <http://jabarprov.go.id>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2015.
- Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun. 2013. Kota Bandung. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun. 2012. Kota Bandung. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun. 2011. Kota Bandung. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Puspandika, Bery Agung. (2007). "Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah: Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat". Skripsi S-1 Departemen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor.
- Regional Disparities and Cohesion: What Strategies For The Future. 2007. Directorate-General For Internal Policies of the Union. Brussels: European Parliament.
- RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018. 2013. Bappeda Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung.
- Rustiadi, Ernani, dkk. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press.
- Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan Statistik Multivariat. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sirojuzilam. (2005). Beberapa Aspek Pembangunan Regional. Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Sjafrizal. (2008). Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi). Padang: Praninta Offset.
- Sjafrizal. (2012). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). 2013. Kota Bandung. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Undulifolia, Crossandra. (2012). "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009". Skripsi S-1 Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
- Wildany, Zulham. (2011). "Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Di Kabupaten Lamongan". Skripsi S-1 Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang.
- Wishlade, F.; Youill, D. 1997. "Measuring Disparities for Area Designation Purposes: Issues for the European Union". dalam Regional and Industrial Policy Research Paper. hlm. 24. Glasgow: Strathclyde Universitas.
- Yuill, D. et al. 2007. "Review, Revision, Reform: Recent Regional Policy Development". dalam EoRPA Paper. vol. 07/1. Glasgow: EPRC.
- Yuill, D. et al. 2008. "New Policy Frameworks, New Policy Approaches. Recent Regional Policy Developments in the EU and Norway". dalam EoRPA Paper. vol. 08/1. Glasgow: EPRC.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.